

ANALISIS KINERJA PEGAWAI DALAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS

ANALYSIS OF CIVIL SERVANT PERFORMANCE IN PREVENTING HIV/AIDS

Fitria Saefatu Amanah^{1*}, Beddy Iriawan Maksudi², Euis Salbiah³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor 16720

*Korespondensi: Fitria Saefatu Amanah. Email: fitriasaefatu30@gmail.com

(Diterima: 24-07-2020; Ditelaah: 19-08-2020; Disetujui: 16-09-2020)

ABSTRACT

This research aims to describe the civil servant performance, obstacles faced and efforts conducted by the Local Office of Health of Sukabumi City in preventing HIV/AIDS. Civil servant performance can be defined as the record of outcomes produced by civil servants on a specified job function or activity during a specified time period. Civil servant performance is measured by five dimensions, namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. Method of this research is descriptive method supported by qualitative approach. The results of this research show that the civil servant performance of the Local Office of Health of Sukabumi City in preventing HIV/AIDS can be said to have been well achieved when viewed from dimensions of productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability, although there are still found the existing obstacles faced when implementing the prevention of HIV/AIDS. The presence of obstacles is caused by the still existing social stigma, the lack of awareness and will of HIV/AIDS patients, and the social environment factor. The efforts conducted by the Local Office of Health of Sukabumi City are to mostly implement the socialization and information in order to give the detail understanding about dangerousness and ways of HIV/AIDS infection to HIV/AIDS patients, so HIV/AIDS patients know the importance of drinking ARV, are more aware and belong to the will to have treatment, and conduct the prevention and infection to other persons.

Key words: HIV/AIDS, Civil Servant Performance, Health Service.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pegawai, hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dalam penanggulangan HIV/AIDS. Kinerja pegawai didefinisikan sebagai hasil yang dicapai oleh pegawai pada fungsi atau aktivitas kerja tertentu selama periode waktu tertentu. Kinerja pegawai diukur berdasarkan lima dimensi, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dalam penanggulangan HIV/AIDS dapat dikatakan sudah dicapai dengan baik apabila dilihat dari dimensi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, walaupun masih ditemukan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi ketika melaksanakan penanggulangan. Hal ini disebabkan oleh masih adanya stigma masyarakat, kurangnya kesadaran dan kemauan orang dengan HIV/AIDS (ODHA), serta faktor lingkungan sosial. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sukabumi adalah terutama melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang lebih detail tentang bahaya dan cara penularan HIV/AIDS kepada ODHA, agar ODHA mengetahui pentingnya meminum obat ARV, lebih sadar dan memiliki kemauan untuk berobat, serta melakukan pencegahan dan penularan kepada orang lain.

Kata kunci: HIV/AIDS, Kinerja Pegawai, Pelayanan Kesehatan.

PENDAHULUAN

HIV merupakan sejenis virus yang menginfeksi dan menyerang sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh seseorang akibat kurangnya sel imun dalam tubuh, sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul akibat turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh virus HIV. Akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh maka orang yang sudah terjangkit virus HIV menjadi sangat mudah terinfeksi penyakit lain yang bisa berakibat fatal pada tubuh penderita yang terkena virus HIV. Umumnya penularan HIV/AIDS sebenarnya tidaklah mudah, namun masih banyak orang yang beranggapan apabila mereka berdekatan dengan orang yang terkena virus HIV/AIDS mereka bisa tertular, namun anggapan tersebut salah.

Terdapat empat cara virus HIV tersebut menular, yaitu melalui penggunaan narkoba jarum suntik, hubungan seks tanpa pengaman, penularan ibu yang terkena HIV ke anaknya dan melalui transfusi darah yang positif HIV ke orang lain. Infeksi HIV cenderung meningkat dan paling banyak terjadi pada kelompok usia produktif, yaitu kelompok umur 25-49 tahun dan kelompok umur 20-24 tahun. Usia remaja 15-19 tahun menduduki posisi keempat. Usia remaja adalah usia yang sangat rentang untuk terinfeksi virus HIV akibat dari pergaulan maupun lingkungan. Ada lebih dari setengah infeksi baru HIV didunia ditemukan pada usia 15-19 tahun, mayoritas remaja terinfeksi karena hubungan seksual dan penggunaan narkoba jarum. Penyebaran HIV/AIDS di Indonesia sebagaimana dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), tanggal 27 Agustus 2019, menunjukkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS yang mendekati angka setengah juta atau 500.000 yaitu 466.859 yang terdiri atas 349.882 HIV dan 116.977 AIDS.

Pemerintah pusat mewajibkan seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota

melalui Dinas Kesehatan untuk ikut berperan dalam mengatasi masalah tersebut. Tugas dari pemerintah Kota/Kabupaten dalam penanggulangan HIV/AIDS di daerah adalah menyelenggarakan berbagai upaya pengendalian dan pencegahan HIV/AIDS, menyelenggarakan penetapan situasi epidemik HIV tingkat Kabupaten/Kota, menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan, HIV/AIDS, dan menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan serta evaluasi dengan memanfaatkan informasi yang ada. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Dinas Kesehatan dituntut agar dapat menyebarluaskan informasi dari bahaya HIV/AIDS kepada masyarakat luas serta, dapat membangun koordinasi setiap instansi yang terlibat agar dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di daerahnya.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi telah membuat Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS. Peran Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan serta penanggulangan HIV/AIDS sangat penting, karena pencapaian keberhasilan dari Dinas Kesehatan dapat dilihat dari menurunnya jumlah kasus HIV/AIDS, serta meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya dari HIV/AIDS, sehingga tingkat diskriminasi pada orang dengan HIV/AIDS (ODHA) akan menurun sehingga para penderita bisa kembali ke lingkungan masyarakat tanpa rasa takut akan tindakan diskriminasi dari masyarakat sekitar.

Proporsi kasus HIV dan AIDS di Kota Sukabumi tertinggi ditemukan pada rentan usia produktif yaitu usia 25-49 tahun (108 kasus) dan usia 20-24 tahun (29 kasus), dimana kemungkinan penularan terjadi pada usia remaja. Ditemukannya Kasus HIV dan AIDS pada usia di bawah 4 tahun (4 kasus), menandakan terjadinya penularan HIV dari ibu ke anak, pada hal untuk mencapai tujuan nasional dan global dalam rangka *triple elimination* (eliminasi HIV, hepatitis B, dan sifilis) pada bayi, diharap-

kan kasus HIV AIDS pada usia di bawah 4 tahun menurun bahkan sampai tidak ditemukan kasus. Selain itu terjadi juga perubahan trend dalam proses penularan HIV AIDS dimana sebelum Tahun 2007 penularan kasus terbanyak dari Pengguna Jarum Suntik. Sejak setengah dekade terakhir, terutama di 4 Tahun terakhir, peningkatan kasus terjadi di Populasi Kunci LSL (Laki-laki Seks Laki-laki). Menurut Staf Komisi Penanggulangan Penyakit Menular di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, hingga akhir Agustus 2019 di Kota Sukabumi sendiri sedikitnya telah ditemukan 71 kasus. Namun jumlahnya diperkirakan akan terus melonjak bertambah dan bisa melampaui jumlah penderita pada tahun 2018.

MATERI DAN METODE

Konsep/Teori yang Relevan

Prawirosentono (1999: 2) mengemukakan bahwa kinerja atau *performance* adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan, baik secara legal, tidak melanggar hukum, maupun sesuai dengan moral dan etika.

Bernadin dan Russel (1998: 379) dan Keban (2004: 192) mendefinisikan kinerja (*performance*) sebagai capaian hasil yang dihasilkan pada fungsi atau aktivitas kerja tertentu selama periode waktu tertentu (*the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period*). Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan adalah catatan tentang hasil akhir yang diperoleh pegawai setelah suatu pekerjaan dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja hanya mengacu pada beberapa hasil yang dicapai oleh pegawai pada kurun waktu tertentu dan tidak termasuk ke dalam karakteristik pribadi pegawai yang dinilai.

Dwiyanto (2005: 147-150) dan Yang, dkk (2020) mengemukakan bahwa untuk

menilai kinerja pegawai dan organisasi dapat digunakan beberapa kriteria sebagai pedoman penilaian kinerja. Setidaknya terdapat lima dimensi, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan lima dimensi tersebut untuk mengukur kinerja pegawai dalam penanggulangan HIV/AIDS, yaitu:

Pertama, produktivitas, yaitu kemampuan pegawai untuk menghasilkan luaran/hasil yang dibutuhkan oleh *stakeholder* dan masyarakat. *Kedua*, kualitas layanan, yaitu kemampuan pegawai untuk memenuhi harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan *stakeholder* dan masyarakat. *Ketiga*, responsivitas, yaitu daya tanggap pegawai terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan *stakeholder* dan masyarakat. *Keempat*, tanggung jawab, yaitu pemberian pelayanan oleh pegawai sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. *Kelima*, akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan pelayanan oleh pegawai sesuai dengan kepentingan *stakeholder* dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

Metode

Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2017) adalah metode yang berguna untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data dan sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Kualitatif menurut Sugiyono (2017) adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk menyelidiki pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Gunung

Parang, Jl. Surya Kencana No.41, Selabatu, Kec. Cikole, Kota Sukabumi Jawa Barat. Adapun fokus pada penelitian ini yaitu gambaran secara menyeluruh mengenai Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dalam Penanggulangan HIV dan AIDS. Berdasarkan teori pengukuran kinerja menurut Dwiyanto tersebut, maka kinerja pegawai dalam penanggulangan HIV/AIDS dapat diukur berdasarkan lima dimensi, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pengkaji yaitu observasi dan wawancara. Dengan demikian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *data reduction* (reduksi data) dan *data display* (penyajian data).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan daerah dalam bidang kesehatan untuk menunjang keberhasilan kesejahteraan masyarakat dan melakukan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya.

Kinerja Pegawai Dalam Penanggulangan HIV/AIDS

Untuk mendeskripsikan lebih dalam mengenai kinerja pegawai Dinas Kesehatan dalam penanggulangan HIV/AIDS, maka peneliti menggunakan teori pengukuran kinerja menurut Dwiyanto sebagaimana dikemukakan di atas, yang terdiri atas lima dimensi sebagai berikut:

Pertama, produktivitas. Hasil wawancara dengan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan

Kota Sukabumi mengungkapkan bahwa produktivitas di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi sudah bagus, dilihat dari segi pegawai yang memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya dan pegawai yang selalu teliti dalam menyelesaikan pekerjaan.

Kedua, kualitas layanan. Hasil wawancara dengan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Sukabumi mengungkapkan pegawai Dinas Kesehatan Kota Sukabumi yang cekatan dalam menangani pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS serta pegawai yang selalu memberikan perhatian kepada masyarakat ketika sedang mengadakan sosialisasi. Kualitas pelayanan dapat diukur dari pelayanan pegawai dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya penyakit HIV/AIDS.

Ketiga, responsibilitas. Hasil wawancara dengan Seksi Bidang Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Sukabumi mengungkapkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Sukabumi sudah memberikan pelayanan yang sama kepada semua masyarakat tidak memandang status atau jabatan dari orang tersebut.

Keempat, responsivitas. Hasil wawancara dengan Seksi Bidang Penyakit Menular mengungkapkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Sukabumi memberikan informasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kepada masyarakat secara tepat. Melalui sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan kepada populasi kunci untuk memberikan edukasi tentang bahaya penyakit HIV/AIDS. Serta prosedur dan mekanisme kerja yang dikerjakan telah sesuai dengan SOP sehingga dapat berjalan dengan baik.

Kelima, akuntabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Bidang Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, para pegawai sudah bekerja sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada sehingga meningkatkan akuntabilitas dengan tanggung jawab yang sudah

diemban oleh masing-masing pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terungkap informasi tentang adanya hambatan dan upaya yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Hambatan Peningkatan Kinerja Pegawai Dalam Penanggulangan HIV/AIDS

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Sukabumi untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam penanggulangan HIV/AIDS adalah sebagai berikut:

Pertama, stigma masyarakat. Hasil wawancara dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa meski sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang HIV/AIDS, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memaklumi dan bersikap terbuka kepada pengidap HIV/AIDS. Dengan kata lain, masyarakat sebenarnya juga tidak mendapatkan pemahaman dan informasi yang tepat terkait HIV/AIDS. Hasilnya masih banyak ODHA yang sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat.

Kedua, kurangnya kesadaran dan kemauan ODHA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, salah satu hambatan dari pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah kurangnya kesadaran dan kemauan ODHA untuk melakukan penyembuhan seperti mengonsumsi obat *Anti Retroviral Virus* (ARV). Hal ini disebabkan oleh kecemasan dan ketakutan yang dialami ODHA dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Kurangnya kesadaran ODHA tersebut disebabkan juga karena tingkat pengetahuan pasien yang rendah.

Ketiga, faktor lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota

Sukabumi, hambatan lainnya berasal dari faktor lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap tingginya angka HIV/AIDS di Kota Sukabumi. Adapun penyebabnya yaitu tingginya penyakit masyarakat, seperti seks bebas di kalangan LGBT, penjaja seks tanpa menggunakan kondom, dan penyalahgunaan narkoba dengan penggunaan jarum suntik secara bergantian.

Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Dalam Penanggulangan HIV/AIDS

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sukabumi untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam penanggulangan HIV/AIDS adalah sebagai berikut:

Pertama, penanggulangan stigma masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi memberikan pengertian dan pengetahuan yang memadai kepada masyarakat terutama kepada populasi kunci. Stigma dan diskriminasi biasanya terjadi karena adanya rasa ketakutan tertular oleh HIV/AIDS. Masalah lain adalah pemahaman masyarakat yang masih mengira bahwa penyakit HIV/AIDS masih belum ada obatnya, serta anggapan penyakit tersebut ditularkan oleh perilaku menyimpang sehingga dianggap menjadi aib bagi pengidap maupun keluarganya. Pada hal, jika benar-benar dipahami dan menyadari cara penularan penyakit tersebut, penyakit ini dapat dicegah tanpa harus menjauhi apalagi sampai melakukan diskriminasi terhadap pengidap HIV/AIDS.

Kedua, penanggulangan kurangnya kesadaran dan kemauan ODHA. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi lebih memberikan pengertian dan pemahaman yang detail tentang bahaya dan cara penularan HIV/AIDS kepada ODHA saat sedang melakukan sosialisasi maupun penyuluhan agar para ODHA mengetahui pentingnya meminum obat ARV serta lebih sadar dan memiliki kemauan untuk berobat dan melakukan pencegahan penularan kepada orang lain.

Ketiga, penanggulangan faktor lingkungan. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi lebih meningkatkan koordinasi dengan guru-guru di sekolah maupun ibu-ibu untuk memberikan pendidikan seks bagi remaja, baik di lingkungan sekolah, kampus, maupun karang taruna.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kinerja pegawai Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dalam penanggulangan HIV/AIDS dapat dikatakan telah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal. Berdasarkan hasil analisis teori pengukuran kinerja terdapat lima dimensi untuk menilai kinerja pegawai sebagai berikut:

Pertama, dimensi produktivitas sudah sangat baik karena pegawai memiliki tanggung jawab yang tinggi pada saat bekerja, pegawai selalu teliti dalam menyelesaikan pekerjaan, pegawai memiliki inisiatif yang tinggi dalam bekerja, pegawai selalu bersikap sabar dan sopan saat sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV, pegawai mampu mengaplikasikan pengetahuan kerja yang dimiliki dalam bidang pekerjaan, serta pegawai berusaha bekerja secara efisien dengan memanfaatkan waktu kerja yang tersedia.

Kedua, dimensi kualitas layanan hasilnya sudah baik, hanya perlu diadakannya pelatihan kepada pegawai sehingga tidak terjadi penumpukan dalam menyelesaikan pekerjaan yang sudah sesuai dengan *job desk*-nya.

Ketiga, dimensi responsivitas sudah baik. Perilaku kerja pegawai yang baik serta berkurangnya jumlah pengidap HIV/AIDS di Kota Sukabumi yang mempengaruhi kinerja Dinas Kesehatan menjadi lebih baik.

Keempat, dimensi tanggung jawab sudah baik. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi

pada saat memberikan informasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kepada masyarakat secara tepat melalui sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan kepada populasi kunci untuk memberikan edukasi tentang bahayanya penyakit HIV/AIDS.

Kelima, dimensi akuntabilitas sudah baik, karena pegawai yang bekerja sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

Pertama, untuk meningkatkan upaya program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Sukabumi perlu adanya penambahan jumlah personil di Bidang Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Sukabumi yang melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS agar pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS semakin lebih baik apabila jumlah pelaksanaannya lebih banyak.

Kedua, Bidang Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Sukabumi membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) khusus program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS untuk mengatur prosedur-prosedur kerja agar lebih terencana dan terperinci dengan baik.

Ketiga, kualitas kerja pegawai perlu ditingkatkan dengan memberikan pelatihan atau seminar baik di dalam Dinas maupun di luar Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.

Keempat, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi harus lebih memaksimalkan upaya dalam memberikan penjelasan dan pengertian mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, upaya tersebut dapat dilakukan di media massa dan melalui penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Bernardin, John & Russel, E. A. Joyce. (1998). *Human Resource Management: An Experiential Approach*.
- Dwiyanto, Agus. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keban, Yeremias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Prawirosentono, Suyadi. (1999). *Kebijakan Kinerja Karyawan: Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Andriani, Aida. (2018). "Analisa Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan Aids di Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi". *Jurnal Endurance*, 3(3): 531-546. <http://doi.org/10.22216/jen.v3i3.2828>.
- Puadi, Akhmad Rionar Asrari. (2016). "Peran Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Kotawaringin Timur". *Jurnal Promkes*, 4(2): 117-128. <http://dx.doi.org/10.20473/jpk.V4.I2.2016.116-128>.
- Rahmadi, Triyo. (2015). "Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV-AIDS) Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 (Studi di Kabupaten Kebumen)". *Jurnal Idea Hukum*, 1(1): 59-64. <http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/viewFile/6/5>.
- Yang, Jun Sam; Hernawan, Denny & Seran, G. Goris. (2020). "Kinerja Pegawai Negeri

Sipil di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor". *Jurnal GOVERNANSI*, 6(1): 57-62. <http://dx.doi.org/10.30997/jgs.v6i1.2508>.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Upaya Penanggulan HIV dan AIDS.